

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhana Wa' Taala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022. Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024 yang telah ditetapkan dan merupakan tahun kedua pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.

Bedasarkan pada hasil evaluasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Rencana Kerja (RENJA) sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun Anggaran 2022, melalui Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

Tarakan, Juli 2021

Pih.Kepala Dinas Kesehatan


dr. Devi Ika Indriarti., M.Kes
NIP.197005172002122006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Singkatan	iii
Daftar Bagan	iv
Daftar Tabel	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	4
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Sistematika Penulisan	7
BAB II	
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN	9
A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan.....	9
B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan	18
C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan	21
D. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	25
E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	54
BAB III	
TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN	56
A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	56
B. Telaahan Terhadap Kebijakan Provinsi Kaltara	59
C. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan	60
BAB IV	
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN	69

A. Program dan Kegiatan.....	69
BAB V	
PENUTUP	77

DAFTAR SINGKATAN

1. Renja	: Rencana Kerja
2. OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
3. Renstra	: Rencana Strategis
4. RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
5. RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
6. APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
7. KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
8. PD	: Perangkat Daerah
9. PPAS	: Prioritas Platform Anggaran Sementara
10. RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
11. SKPD	: Satuan Kinerja Perangkat Daerah
12. RKA	: Rencana Kerja Anggaran
13. BHP	: Bahan Habis Pakai
14. DAK	: Dana Alokasi Khusus
15. SK	: Surat Keputusan
16. AKIP	: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
17. IKM	: Indeks Kepuasan Masyarakat
18. FKTP	: Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
19. UPT	: Unit Pelaksana Teknis
20. BLUD	: Badan Layanan Umum Daerah
21. FKRTL	: Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
22. Musrembang	: Musyawarah Rencana Pembangunan
23. ASN	: Aparatur Sipil Negara
24. PK 5	: Pedagang Kaki Lima
25. Lansia	: Lanjut Usia
26. SPM	: Standar Pelayanan Minimal
27. ODGJ	: Orang Dengan Gangguan Jiwa
28. SAKIP	: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

DAFTAR BAGAN
DAFTAR DIAGRAM & GRAFIK

Gambar 1.1	: Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2	: Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah	3

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2020	10
Tabel 2.2	: Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan	20
Tabel 2.3	: Review Terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021	26
Tabel 2.4	: Daftar Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022	52
Tabel 3.1	: Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan Tingkat Kota Tarakan	61
Tabel 3.2	: Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021	67
Tabel 4.1	: Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai Salah Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kesehatan Kota Tarakan merupakan Instansi Pelaksana yang melakukan kegiatan pelayanan Pemerintahan kepada masyarakat dalam bentuk Pelayanan Kesehatan. Unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Renja merupakan dokumen perencanaan OPD satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra), digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

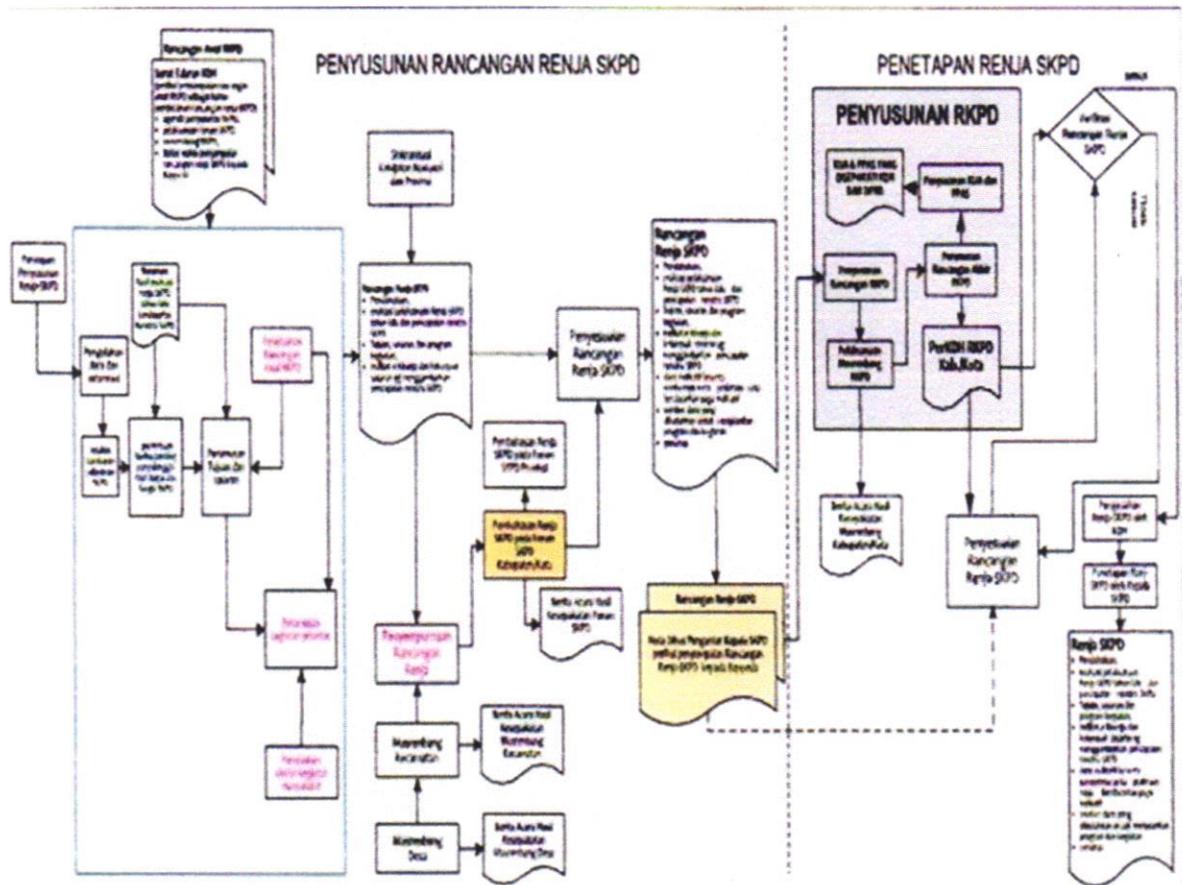
Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

Rencana Kerja (Renja) disusun mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga dapat dikerjakan secara simultan / paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi Renja tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian target Renstra Perangkat Daerah.

Berdasarkan pada uraian di atas, serta untuk menjawab permasalahan yang terkait dengan tugas dan fungsi OPD, maka disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan 2022.

Renja OPD disusun berdasarkan :

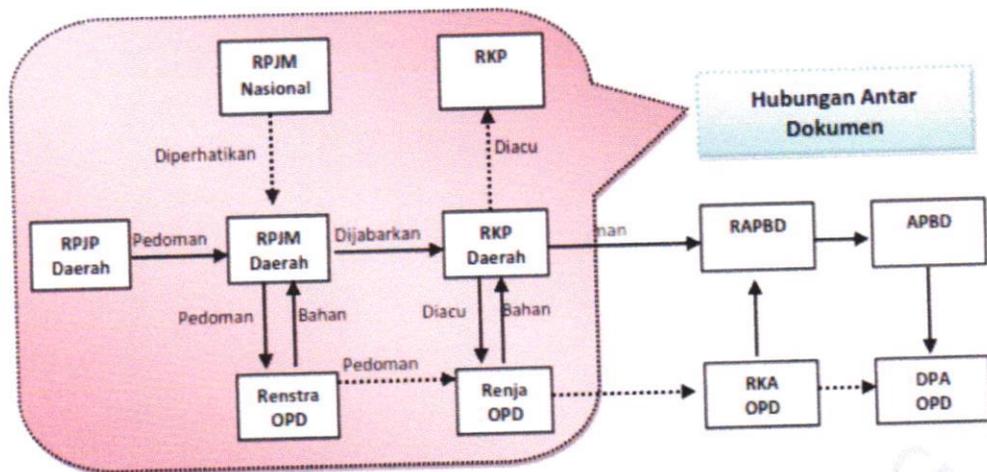
1. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu.
2. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif.
3. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab PD.



Gambar 1.1 Bagan Alur Rancangan Renja Perangkat Daerah

Renja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup satuan kerja merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan sebagai sebuah proses yang sistematis dan terpadu.

Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.



Gambar 1.2 Bagam Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah :

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tk.II Tarakan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144)
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024;
18. Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja Atas Laporan Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja ini untuk memantapkan kinerja Dinas Kesehatan lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam keberhasilan mencapai tujuan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih baik (*Good Government*) dengan penyelenggaraan seiring dalam perwujudan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban kinerja yang lebih jelas, tepat dan terukur. Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 ini disusun dengan maksud:

1. Sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan Tahun 2022 ;
2. Untuk menterjemahkan Perencanaan Strategis Lima Tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD ke dalam Perencanaan Tahunan yang sifatnya lebih operasional; dan
3. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang

mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Rencana Kerja sebagai pedoman dalam 1 (satu) tahun.

Sedangkan tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Kesehatan dalam mengoperasionalkan RKPD Kota Tarakan Tahun 2022, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai visi dan misi RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024.
2. Menetapkan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2022;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana program dan kegiatan
4. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dalam APBD Tahun 2022.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan, review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, tujuan dan sasaran Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Bab ini memuat Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2022

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu Dan Capaian Renstra.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

Kegiatan evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun lalu (2020), Dinas Kesehatan melaksanakan 14 (Empat Sebelas) Program dan 49 (Empat Puluh Sembilan) kegiatan dengan alokasi dana sebesar Rp.73.425.246.079.41,- dengan perincian Rp. 29.916.947.203.00,- untuk Belanja Tidak Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 28.205.134.441.00,- atau 94,28 % dan Rp. 43.508.298.876,41- untuk Belanja Langsung dengan realisasi sebesar Rp. 31.465.096.787,88,- atau sebesar 72,32 %.

Program dan Kegiatan serta realisasi anggaran yang dilaksanakan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2020

	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2020-2024		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s.d. Renja SKPD Tahun Lalu (2019)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2020)		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2020 (%)			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	3	4	5		6		7		12 = 8+9+10+11		13 = 12/7 x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x100%			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	Urusan Wajib																	
	Bidang Urusan Kesehatan																	
1	Program Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran	100	%	34,785,810,000.00			5,542,161,433										
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Materai 6000 yang Tersedia Jumlah Materai 3000 yang Tersedia Jumlah Perangko	12500	Lembar	75,000,000.00			935	Lembar	4,960,000	935.00	4,958,000	100%	100%	935.00	4,958,000	7%	7%
		Jumlah Paket Pengiriman	250	Paket	7,500,000.00			10	Paket	5,021,600	10.00	4,229,500	100%	84%	10.00	4,229,500	4%	56%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Bulan Pembayaran Listrik, Air, Telpon, Internet, TV Kabel	60	Bulan	5,750,000,000.00			12	Bulan	1,032,182,386	12.00	676,607,022	100%	66%	12.00	676,607,022	20%	12%
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional	Jumlah Kendaraan Roda 2 dan Roda 4 Operasional	460	Unit	447,500,000.00			74	Unit	54,077,100	24.00	27,780,300	32%	51%	24.00	27,780,300	5%	6%
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah ASN mendapat Tunjangan Panitia Pelaksana Kegiatan	90	Orang	1,192,500,000.00			31	Orang	228,156,000	27.00	197,211,000	87%	86%	27.00	197,211,000	30%	17%
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Alat dan Bahan kebersihan	14315	Jenis	500,000,000.00			2863	Jenis	90,278,251	2,863.00	79,251,500	100%	88%	2863.00	79,251,500	20%	16%
		Jumlah Tenaga Kontrak Kebersihan	135	Orang	6,015,060,000.00			27	Orang	479,100,000	27.00	452,073,225	100%	94%	27.00	452,073,225	20%	8%

	Pelatan UKM dan UKP														
Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan jaringannya	Jumlah UPT yang Melaksanakan Kalibrasi, Maintenance, dan Perbaikan Alat Kesehatan	7 UPT	3,290,790,000.00			7 UPT	220,000,000.00	0.00		0%	0%	0.00		0%	0%
Peningkatan kesehatan masyarakat	Jumlah pelayanan UKM yang Dilaksanakan oleh Puskesmas	75 pelayanan	2,411,500,000.00			50 pelayanan	3,938,680,754.00	20.00	3,194,613,904	40%	81%	20.00	3,194,613,904	27%	132%
Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan	Jumlah UPT yang Dilayani Dalam Pelaksanaan Penyimpanan, Penerimaan, dan Pendistribusian Obat, Vaksin, Alkes dan BHP	7 UPT	850,000,000.00			7 UPT	363,832,000.00	7.00	276,230,250	100%	76%	7.00	276,230,250	20%	32%
Pembinaan dan Fasilitasi Pelayanan Posyandu	Jumlah Kader Posyandu yang Dibina	4500 Kader	8,776,250,000.00			901 Kader	1,622,700,000.00	891.00	1,613,700,000	99%	99%	891.00	1,613,700,000	20%	18%
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Mamburungan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	85	8,169,808,357.00			70	1,454,617,762.00	80.93	918,489,002	116%	63%	80.93	918,489,002	95%	11%
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Juata Permai	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata Permai	85	13,401,735,135.00			70	2,020,262,274.00	83.28	1,418,954,942	119%	70%	83.28	1,418,954,942	98%	11%
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Gunung Lingkas	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas	85	13,724,877,016.00			76	2,911,514,816.00	80.86	1,728,555,492	106%	59%	80.86	1,728,555,492	95%	13%
Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Pantai Amal	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Pantai Amal	85	3,772,438,827.00			70	472,508,000.00	80.47	557,851,447	115%	118%	80.47	557,851,447	95%	15%

													Rata-rata capaian kinerja (%)		100%	53%			83%	13%
													Predikat kinerja		ST	SR			ST	R
9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Penderita Penyakit Menular yang Tertangani Sesuai Standar	100 %		3,062,392,000.00				1,942,826,691											
	Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk	Jumlah Tiitik Fogging Focus	415 focus		944,392,000.00		50 focus	93,600,000	16	26,160,000	32%	28%	16	26,160,000	4%	3%				
	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase Orang Terduga TB Mendapat Pelayanan TBC sesuai Standar	100 %		417,000,000.00		100 %	1,357,142,641	100	1,227,982,772	100%	90%	100	1,227,982,772	20%	294%				
		Persentase Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	100 %		417,000,000.00		100 %	290,589,850	100	236,002,800	100%	81%	100	236,002,800	20%	57%				
		Persentase Orang Penderita Malaria Mendapatkan Pelayanan Malaria Sesuai Standar	100 %		417,000,000.00		100 %	159,019,200	100	143,459,200	100%	90%	100	143,459,200	20%	34%				
		Persentase Penderita Kusta Mendapatkan Pelayanan Kusta Sesuai Standar	100 %		417,000,000.00		100 %	13,500,000	100	1,000,000	100%	7%	100	1,000,000	20%	0%				
	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah'	Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemilogi	1410 Kegiatan		450,000,000.00		243 Kegiatan	28,975,000	243	17,900,000	100%	62%	243	17,900,000	17%	4%				
													Rata-rata capaian kinerja (%)		89%	60%			17%	65%
													Predikat kinerja		T	R			T	ST
10	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase UPT yang terkreditasi	100 %		3,001,850,250.00			333,906,000												
	Penyusunan standar pelayanan kesehatan	Jumlah UPT yang Terakreditasi	8 UPT		1,501,850,250.00		2 UPT	314,756,000	0	27,975,000	0%	9%	0.00	27,975,000	0%	2%				

	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	Jumlah UPT yang Menerapkan BLUD	5 UPT	1,500,000,000.00			3 UPT	19,150,000	3	11,120,000	100%	58%	3.00	11,120,000	60%	1%	
	Rata-rata capaian kinerja (%)											50%	33%			30%	1%
	Predikat kinerja											SR	SR			ST	SR
11	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskemas pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas dan Jaringannya Per Satuan penduduk	100 %	1,400,000,000.00				200,000,000									
	Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas Pembantu	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Pustu	700,000,000.00			1 Pustu	50,000,000	1	49,843,000	100%	100%	1.00	49,843,000	20%	7%	
	Rehab sedang/berat Gedung Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi Sesuai dengan Standar	1 PKM	700,000,000.00			1 PKM	150,000,000	1	148,950,000	100%	99%	1.00	148,950,000	20%	21%	
	Rata-rata capaian kinerja (%)											100%	99%			20%	21%
	Predikat kinerja											ST	ST			ST	ST
12	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	2,275,400,000.00				30,000,000									
	Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Persentase Kunjungan Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	100 %	2,275,400,000.00			100 %	30,000,000	100	29,724,000	100%	99%	100.00	29,724,000	20%	1%	
	Rata-rata capaian kinerja (%)											100%	99%			20%	1%
	Predikat kinerja											ST	ST			ST	SR
13	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan	100 %	3,350,000,000.00				504,262,000									

		Persalinan Sesuai Standar														
	Pelayanan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Persentase Bayo Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	100 %	3,350,000,000.00		100 %	504,262,000	100	495,543,105	100%	98%	100.00	495,543,105	20%	15%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100%	98%			20%	15%
										Predikat kinerja	ST	ST			ST	S
14	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase jumlah penduduk mendapatkan JKN		22,500,000,000.00			7,405,186,841									
	Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat	Jumlah Penduduk Miskin yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional	253821 Jiwa	22,450,000,000.00		19556 Jiwa	7,395,948,000	19596	5,738,106,500	100%	78%	19596.00	5,738,106,500	8%	26%	
	Kemitraan Peningkatan Kualitas Dokter dan Perawat	Jumlah Dokumen Kerjasama yang Disepakati	1 Dok	50,000,000.00		1 Dok	9,238,841	1	8,601,341	100%	93%	1.00	8,601,341	20%	17%	
										Rata-rata capaian kinerja (%)	100%	85%			14%	21%

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN .

Tugas Dinas Kesehatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran pembangunan kesehatan perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijakan Program operasional dan kegiatan -kegiatan. Untuk itu dibutuhkan jalinan kerjasama yang kuat dan kepercayaan antara masyarakat dan instansi terkait.

Keberhasilan program Dinas Kesehatan Kota Tarakan sulit untuk terwujud jika tidak didukung oleh berbagai faktor internal antara lain perencanaan program yang akuntabilitas, aparat yang terampil serta dukungan dana yang memadai. Sedangkan yang menjadi faktor eksternalnya adalah bentuk kepercayaan masyarakat terhadap program-program yang ditawarkan Dinas Kesehatan Kota Tarakan mengacu pada satu tujuan mewujudkan visi dan misi Kota Tarakan yang akan dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan beserta program prioritas. Ada beberapa keberhasilan yang diperoleh oleh Dinas Kesehatan kota Tarakan

1. Salah satu bentuk keberhasilan Dinas Kesehatan dalam memberikan Pelayanan Kesehatan ke masyarakat adalah pencapaian program baik yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) maupun Non SPM yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
2. Selain itu di Tahun 2020, melalui keputusan Badan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian pengembangan propinsi Kalimantan Utara Nomor 050/1477/Bapp-lit.5/2020 tentang pemenang lomba inovasi daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun 2020.
3. Keberhasilan lain yang diperoleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan, di Tahun 2020 Puskesmas Juata Tanda Penghargaan pada Sebagai Juara I Lomba Vlog FKTP Se Kaltara.
4. Keputusan Walikota Tarakan nomor 4266/HK-VIII/302/2020 tentang hasil pemilihan Nakes Teladan di Puskesmas Tahun 2020

Berdasarkan Renstra Dinas Kesehatan dan evaluasi capaian target kinerja SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, bahwa realisasi capaian kinerja pelayanan SKPD Dinas Kesehatan secara umum sampai dengan tahun 2020 telah memenuhi target. Namun, kendala yang ada sampai saat ini antara lain :

1. Terjadinya pandemic Covid 19 sehingga pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan banyak orang dan kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan

2. Terbatasnya SDM terutama yang mendukung kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID
3. Adanya refofusing anggaran untuk pandemi covid 19.
4. Juknis dan aturan terkait penggunaan dana covid yang tidak jelas dan lambat sehingga terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan kegiatan dan menghambat pelaksanaan kegiatan.
5. Adanya anggaran dari pusat (BOK Tambahan) yang dananya terlambat ditransfer ke daerah.
6. Jumlah dana yang ditransfer kurang dibandingkan dengan realisasi pelaksanaan (Dana insentif nakes Covid/ BOK tambahan , hanya berbayar sampai bulan November 2020).
7. Proses belanja/pengadaan untuk BHP dan Obat-Obatan yang bersumber DAK fisik terdapat beberapa kontrak yg barang pesananannya datang tidak sesuai pesanan.
8. Terkait upaya menekan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi (AKI & AKB) kendala yang dihadapi :
 - a. Masih ada ibu hamil yang tidak rutin memeriksakan kesehatannya ke Puskesmas
 - b. Ibu hamil dengan riwayat Kekurangan Energi Kronik (KEK) dalam jangka waktu lama
 - c. Kurangnya pengetahuan ibu hamil dan keluarga terkait kehamilannya.
 - d. Ibu hamil dengan risiko tinggi
 - e. Kurangnya koordinasi dan kerjasama oleh ibu hamil pada saat dilaksanakan Home Care oleh petugas Puskesmas.
 - f. Masih ada yang melahirkan di dukun
 - g. Faktor ekonomi ibu hamil
9. Terkait program lainnya seperti Lansia sangat dipengaruhi oleh ketersediaan reagen dan BHP untuk pelaksanaan screening Kesehatan
10. Kerjasama antar Puskesmas dan lintas sector terkait masih perlu dimaksimalkan.

Keberhasilan kinerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat dari pencapaian indikator dan yang telah ditetapkan. Hasil keberhasilan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan

INDIKATOR SASARAN 2019–2024	Target IKU	Target Renstra Tahun Ke					Proyeksi					Catatan analisis
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan	50%	50%	60%	65%	70%	75%	50%	55%	60%	65%	70%	
Persentase Capaian Upaya Program Kesehatan Masyarakat	50%	50%	60%	65%	70%	75%	50%	55%	60%	65%	70%	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kesehatan	70	70	71	72	73	75	70	71	72	73	74	
Nilai/Predikat AKIP	70/B	68/B	68/B	69/B	69/B	70/BB	68,35/B	69/B	70/B	71/B	72/B	
Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	92%	93%	94%	95%	
Persentase Capaian UHC	95%	95%	96%	97%	98%	100%	95%	96%	97%	98%	98%	

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kota Tarakan, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, capaian terhadap visi dan misi Kepala Daerah, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu strategis Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Isu-isu penting merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan dan hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kota Tarakan. Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, guna pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan pada RPJMD, Dinas Kesehatan Kota Tarakan senantiasa dipengaruhi oleh isu-isu penting yang bersifat strategis, baik berupa kondisi, keadaan, atau peristiwa yang dampaknya dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Adapun permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan

- a. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi, Makan Minum, dan Alat Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan; dan
- b. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
- c. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 64 tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- d. Ketersediaan pedoman teknis SPM bidang kesehatan, pedoman dan prosedur kerja di Puskesmas, pedoman kerja dan akreditasi di Labkesda, dan pedoman pengelolaan Instalasi Farmasi dan Alat Kesehatan;
- e. Jenis SDM Kesehatan;
- f. Paradigma pelayanan dan paradigma sehat SDM Kesehatan;

- g. Adanya Standar Prosedur Operasional di tingkat Puskesmas , ifk dan Labkesda;
- h. Pemahaman Visi, Misi, Program Tujuan, dan Sasaran Walikota dan Wakil Tarakan 2019 - 2024;
- i. Sistem Manajemen Puskesmas: Perencanaan (P1), Mini Lokakarya(P2), dan Penilaian Kerja Puskesmas(P3);
- j. Sistem manajemen puskesmas sebagai indikator Penilaian Kinerja Puskesmas; 11. Keleluasaan menetapkan kebijakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- k. Kegiatan yang dilaksanakan Puskesmas berorientasi pada masalah dan kebutuhan kesehatan di masing-masing wilayah kerja Puskesmas;
- l. Waktu Kerja Efektif pegawai Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis;
- m. Citra pelayanan faskes pemerintah;
- n. Ketersediaan alat kesehatan;
- o. Tersedianya data dan informasi tentang demografi dan sasaran program kesehatan yang akurat;
- p. Perencanaan operasional yang partisipatif;
- q. Jumlah dan keaktifan kader kesehatan.
- r. Kondisi Bangunan Sarana Kesehatan.
- s. Pembagian tugas dan penetapan kinerja individu.
- t. Manajemen SDM.
- u. Rapat Koordinasi dan Monev Program.
- v. Besaran Anggaran Kesehatan.
- w. Realisasi Anggaran.
- x. Fleksibilitas Anggaran.
- y. Pemerintah telah menyediakan dana untuk pemenuhan tenaga, obat, perbekalan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung lainnya.

2. Kelemahan

- a. Ketersediaan tenaga medis, keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, dan tenaga profesional non kesehatan yang ditempatkan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu;
- b. Kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan di tingkat struktural dan fungsional di Dinas Kesehatan dan UPT;
- c. Sumber daya manusia kesehatan di Puskesmas dan UPT lainnya yang sesuai standar ketenagaan dan tata laksana masing-masing program di Puskesmas, kemampuan tata laksana program;

- d. Dukungan kerjasama lintas program dan lintas sektor;
- e. Komitmen dan dukungan stakeholder Puskesmas terhadap program;
- f. Sistem Informasi Kesehatan belum terintegrasi dan dikembangkan ke dalam banyak platform digital;
- g. Fokus upaya kesehatan di tingkat FKTP yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif di Puskesmas, dan rehabilitatif dan kuratif oleh praktik dan klinik swasta;
- h. Beban kerja puskesmas;
- i. Ketersediaan obat-obatan dan BHP baik dari jenis dan jumlah.
- j. Pembinaan, pendampingan, bimbingan, dan supervisi program dari Dinas Kesehatan kepada UPT;
- k. Kemampuan puskesmas dalam mengorganisasi partisipasi masyarakat serta membina kemitraan dengan sektor lain yang terkait;
- l. Kondisi Prasarana Kesehatan;
- m. Manajemen mutu/patient safety/keselamatan pasien/pencegahan dan pengendalian infeksi;
- n. Manajemen Keuangan.
- o. Manajemen Logistik yang terintegrasi sistem informasi.
- p. Penegakan hukum regulasi kesehatan, reward dan punishment.
- q. Kualitas Kader Kesehatan.
- r. Kemampuan advokasi petugas kesehatan untuk kerjasama lintas sektor.
- s. Ketepatan Waktu Anggaran.

3. Peluang

- a. Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Tarakan 2019-2024 yang tertuang dalam program unggulan bidang kesehatan meliputi: operasional puskesmas 24 jam; peningkatan biaya operasional (anggaran) kesehatan; dan operasionalisasi rumah sakit umum kota Tarakan
- b. Prioritas program kesehatan dalam RPJMD kota Tarakan tahun 2019-2024;
- c. Pembangunan kesehatan telah menjadi bagian dari penilaian kabupaten/kota HAM;
- d. Komitmen dan dukungan politik dari seluruh penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- e. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di bidang kesehatan;

- f. Adanya pola tata kelola dan pengembangan tugas dan fungsi Puskesmas yang merujuk pada Permenkes 75 tahun 2014 tentang Puskesmas dan Permendagri 79 tahun 2018 tentang BLUD;
- g. Tingkat pendidikan masyarakat serta kemudahan mengakses informasi sebagai peluang meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
- h. Budaya masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan kesehatan dari pemerintah dan swasta;
- i. Komitmen dan dukungan tokoh masyarakat;
- j. Keterjangkauan wilayah kerja Puskesmas secara geografis;
- k. Berkembangnya pelayanan kesehatan swasta di tingkat FKTP dan FKRTL;
- l. Kebijakan di bidang kesehatan;
- m. Akreditasi, Patient Safety, dan Pengendalian Infeksi di Puskesmas dan Labkesda
- n. Kebutuhan masyarakat akan variasi layanan kesehatan.
- o. Kesadaran masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas

4. Ancaman

- a. Revolusi industri 4.0 terjadi sangat cepat dan banyak mempengaruhi perubahan kebiasaan dan gaya hidup individu.
- b. Tahun 2019-2024 Indonesia memasuki gerbang bonus demografi tahun 2035.
- c. Masih rendahnya budaya untuk Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat.
- d. Dukungan pemerintah provinsi untuk kebijakan pelayanan kesehatan di kota Tarakan.
- e. Dukungan dari pihak swasta dan lembaga donor terhadap pembangunan kesehatan di kota Tarakan.
- f. Komitmen dan dukungan lintas sektor.
- g. Transisi Epidemiologi, perubahan struktur penduduk, dan perubahan gaya hidup masyarakat.
- h. Meningkatnya kasus penyakit menular yang disebabkan oleh lingkungan
- i. Tingkat Inflasi di kota Tarakan.
- j. Mobilisasi penduduk yang tinggi menyebabkan penularan penyakit yang cepat.
- k. Masalah kesehatan tenaga kerja pada sektor formal, informal, dan deportasi dari luar negeri.

- l. Peningkatan titik hotspot di Tarakan.
- m. Meningkatnya dampak negatif pada anak dan remaja yang disebabkan penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif.
- n. Produk perbekalan kesehatan yang tidak memiliki izin edar beredar secara online dan offline.
- o. Meningkatnya penyebaran hoaks kesehatan di media sosial dan pesan instan.

D. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022.

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Kesehatan Kota Tarakan berdasarkan Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) .

Review terhadap rancangan awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) dapat dijabarkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.3. Review terhadap Rancangan Awal RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Tahun 2022

Dinas Kesehatan Kota Tarakan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	102,781,278,912	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Layanan Penunjang Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	102,781,278,912	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	2 Dokumen	10,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	2 Dokumen	10,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	5,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUKT	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	5,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	RSUKT	Jumlah Dokumen Lakip	2 Dokumen	5,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	6 Layanan	56,359,929,603	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	6 Layanan	56,359,929,603	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	292 Orang	30,155,676,208	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan tunjangan	292 Orang	30,155,676,208	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUKT	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan	73 Orang	10,906,981,395	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	RSUKT	Jumlah PNS yang mendapatkan gaji dan	73 Orang	10,906,981,395	

			tunjangan					tunjangan		
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN mendapat tunjangan Panitia Pelaksana Kegiatan; Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan; Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	18;168;168 Orang	5,032,936,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Kesehatan	Jumlah ASN mendapat tunjangan Panitia Pelaksana Kegiatan; Jumlah orang (non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan; Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	18;168;168 Orang	5,032,936,000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUKT	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	14 Orang	120,000,000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	RSUKT	Jumlah ASN yang mendapatkan tunjangan administrasi keuangan	14 Orang	120,000,000
		RSUKT	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	127 Orang	10,000,000,000		RSUKT	Jumlah tenaga pendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan	127 Orang	10,000,000,000
		RSUKT	Jumlah orang (Non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	127 Orang	144,336,000		RSUKT	Jumlah orang (Non PNS) yang mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan	127 Orang	144,336,000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	1,217,363,600	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	7 Layanan	1,217,363,600
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah sarpras disiplin pegawai	9 Unit	9,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Kesehatan	Jumlah sarpras disiplin pegawai	9 Unit	9,000,000

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	297 Stel	640,000,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Kesehatan	Jumlah pakaian dinas dan atribut kelengkapannya yang diadakan	297 Stel	640,000,000
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian dinas			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian dinas		
	RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan				RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian kerja lapangan		
	RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian korpri				RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian korpri		
	RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14 Stel	50,000,000		RSUKT	Jumlah pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	14 Stel	50,000,000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi	115 Orang	518,363,600	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat berdasarkan tupoksi	115 Orang	518,363,600
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUKT	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	RSUKT	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Peraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek Peraturan Perundang-Undangan		

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUKT	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	RSUKT	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	8 Layanan	262,000,000		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	8 Layanan	262,000,000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	14 Jenis	5,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia	14 Jenis	5,000,000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUKT	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUKT	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	0 Jenis	-		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	0 Jenis	-
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis ATK yang tersedia; Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	50; 70 Jenis	200,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis ATK yang tersedia; Jumlah jenis bahan dan Peralatan kebersihan Kantor yang tersedia	50; 70 Jenis	200,000,000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUKT	Jumlah ATK yang tersedia				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	RSUKT	Jumlah ATK yang tersedia		
	RSUKT	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia					RSUKT	Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor yang tersedia		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	50; 100000 Jenis; Lembar	20,000,000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	50; 100000 Jenis; Lembar	20,000,000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUKT	Jumlah barang cetakan yang tersedia			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	RSUKT	Jumlah barang cetakan yang tersedia		
		RSUKT	Jumlah penggandaan yang tersedia				RSUKT	Jumlah penggandaan yang tersedia		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Jenis Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia	12 Kegiatan	5,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Kesehatan	Jumlah makanan dan minuman rapat/tamu yang tersedia	12 Kegiatan	5,000,000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUKT	Jumlah penyediaan makanan dan minuman			Fasilitasi Kunjungan Tamu	RSUKT	Jumlah penyediaan makanan dan minuman		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	15 Kali	21,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang terselenggara	15 Kali	21,000,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUKT	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	RSUKT	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana pendukung	1 Sarana	11,000,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana pendukung	1 Sarana	11,000,000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah aset/BMD yang diadakan	26 Unit	450,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah aset/BMD yang diadakan	26 Unit	450,000,000
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUKT	Jumlah pengadaan mobil jabatan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUKT	Jumlah pengadaan mobil jabatan		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0 Unit	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	0 Unit	-

	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Mebel yang diadakan		-	Pengadaan Mebel	Dinas Kesehatan	Jumlah Mebel yang diadakan		-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6 Jenis	200,000,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6 Jenis	200,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUKT	Jumlah pengadaan meubelair RS	10 Unit	200,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	RSUKT	Jumlah pengadaan meubelair RS	10 Unit	200,000,000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	50,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1 Unit	50,000,000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	1,600,084,700	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	7 Layanan	1,600,084,700
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Materai, Perangko dan Paket pengiriman yang tersedia	500; 50 Lembar; Paket	8,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Kesehatan	Jumlah Materai, Perangko dan Paket pengiriman yang tersedia	500; 50 Lembar; Paket	8,000,000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUKT	Jumlah Materai yang tersedia			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RSUKT	Jumlah Materai yang tersedia		
		RSUKT	Jumlah paket pengiriman				RSUKT	Jumlah paket pengiriman		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	947,684,700	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Kesehatan	Cakupan waktu pembayaran tagihan telepon, air, listrik, internet berlangganan dan gas	12 Bulan	947,684,700
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUKT	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RSUKT	Cakupan waktu pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUKT	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	RSUKT	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia		

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Cakupan waktu penyediaan jasa layanan umum kantor	12 Bulan	644,400,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Kesehatan	Cakupan waktu penyediaan jasa layanan umum kantor	12 Bulan	644,400,000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUKT	Cakupan waktu penyediaan jasa layanan umum kantor			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	RSUKT	Cakupan waktu penyediaan jasa layanan umum kantor		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	317 Unit	1,306,737,560	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	317 Unit	1,306,737,560
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	64 Unit	16,301,100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terselenggara	64 Unit	16,301,100
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUKT	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendarannya terbayarkan	21 Unit	20,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	RSUKT	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendarannya terbayarkan	21 Unit	20,000,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	37560 Liter; 92 Unit	264,041,900	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pajak dan pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terselenggara	37560 Liter; 92 Unit	264,041,900

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUKT	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendarannya terbayarkan	7 Unit	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	RSUKT	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang pajak kendarannya terbayarkan	7 Unit	25,000,000
	Pemeliharaan Mebel	Dinas Kesehatan				Pemeliharaan Mebel	Dinas Kesehatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	161 Jenis	31,394,560	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	161 Jenis	31,394,560
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUKT	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Jenis	100,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	RSUKT	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	15 Jenis	100,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara; Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	3; 0 Unit	200,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara; Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	3; 0 Unit	200,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUKT	Jumlah gedung kantor dan bangunan RS yang di terpelihara	2 unit	600,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	RSUKT	Jumlah gedung kantor dan bangunan RS yang di terpelihara	2 unit	600,000,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	RSUKT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	50,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	RSUKT	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung	1 Unit	50,000,000

Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor yang dipelihara			Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Gedung Kantor yang dipelihara		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	75	41,575,163,449	Peningkatan Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	75	41,575,163,449
	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	80			Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Karang Rejo	80	
	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	75			Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Juata	75	
	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	75			Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Sebengkok	75	
	Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	75			Dinas Kesehatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Mamburungan	75	
	RSUKT	Persentase capaian SPM RS	70			RSUKT	Persentase capaian SPM RS	70	

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Gunung Lingkas, Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Karang Rejo; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Juata; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Sebangkok; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Mamburungan	12 Bulan	11,575,163,449	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Dinas Kesehatan	Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Gunung Lingkas, Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Karang Rejo; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Juata; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Sebangkok; Cakupan Waktu pelayanan BLUD Puskesmas Mamburungan	12 Bulan	11,575,163,449
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUKT	Cakupan waktu pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 Bulan	30,000,000,000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	RSUKT	Cakupan waktu pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	12 Bulan	30,000,000,000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100%	123,537,353,510	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Dinas Kesehatan	Persentase UPT yang melaksanakan UKP dan UKM	100%	123,537,353,510
	Dinas Kesehatan	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0.02			Dinas Kesehatan	Rasio Daya Tampung RS terhadap jumlah penduduk	0.02	

	Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	80%		Dinas Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten Kota yang terakreditasi	80%	
	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan	205/100.000 KH		Dinas Kesehatan	Angka Kematian Ibu Melahirkan	205/100.000 KH	
	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	18.6/1000 KH		Dinas Kesehatan	Angka Kematian Bayi	18.6/1000 KH	
	Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita	35/1000 KH		Dinas Kesehatan	Angka Kematian Balita	35/1000 KH	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu melahirkan	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan pada usia lansia	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	
	Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100	

		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100			Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	100	
		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100			Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan Orang terduga tuberkulosis	100	
		Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100			Dinas Kesehatan	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tubuh manusia (HIV)	100	
		Dinas Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16.78			Dinas Kesehatan	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	16.78	
		Dinas Kesehatan	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100			Dinas Kesehatan	Persentase UPT yang memiliki ketersediaan obat, vaksin esensial, dan perbekalan kesehatan	100	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	8 UPT	93,983,207,901	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standar	8 UPT	93,983,207,901
		Dinas Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarpras dan alkes sesuai standar	4 RS			Dinas Kesehatan	Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarpras dan alkes sesuai standar	4 RS	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan				Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan			

	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar;	1 PKM	1,000,000,000	Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dibangun sesuai standar;	1 PKM	1,000,000,000
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang dibangun sesuai standar; Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun sesuai standar	1 Unit Labkesda	1,000,000,000	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang dibangun sesuai standar; Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun sesuai standar	1 Unit Labkesda	1,000,000,000
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembangunan rumah dinas			Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pembangunan rumah dinas		
	Pengembangan Rumah Sakit	RSUKT	Jumlah Pengembangan rumah sakit	8 Unit	11,369,609,000	Pengembangan Rumah Sakit	RSUKT	Jumlah Pengembangan rumah sakit	8 Unit	11,369,609,000
	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dikembangkan sesuai dengan standar;			Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang dikembangkan sesuai dengan standar;		
	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan				Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan			
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUKT	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	5 Unit	2,000,000,000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	RSUKT	Jumlah rehabilitasi bangunan rumah sakit	5 Unit	2,000,000,000
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang direhab sesuai dengan standar;			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang direhab sesuai dengan standar;		
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Unit	11,508,657,895	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Labkesda yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Unit	11,508,657,895
		Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Unit	200,000,000		Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas pembantu yang direhabilitasi sesuai dengan standar	1 Unit	200,000,000

	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang direhab			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah rumah dinas yang direhab		
	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;			Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang terpenuhi sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan;		
		Dinas Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan sesuai standar (posyandu dan UKS)	100 Unit	50,000,000		Dinas Kesehatan	Jumlah sarana kesehatan sesuai standar (posyandu dan UKS)	100 Unit	50,000,000
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan Prasarana Kesehatan Puskesmas dan pendukungnya sesuai standar	22 Paket	3,932,473,531	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah pengadaan Prasarana Kesehatan Puskesmas dan pendukungnya sesuai standar	22 Paket	3,932,473,531
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pengadaan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	1 Paket	1,000,000,000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pengadaan Prasarana Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	1 Paket	1,000,000,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang tersedia alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	7 UPT	5,793,255,000	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang tersedia alat kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	7 UPT	5,793,255,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	200 Jenis	49,793,066,733	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pengadaan alat-alat kesehatan Rumah Sakit	200 Jenis	49,793,066,733
	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi alat kesehatan	7 UPT	200,000,000	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang melaksanakan kalibrasi alat kesehatan	7 UPT	200,000,000

	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah ketersediaan Obat dan vaksin esensial	40 item	1,348,032,828	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinas Kesehatan	Jumlah ketersediaan Obat dan vaksin esensial	40 item	1,348,032,828
	Pengadaan Obat, Vaksin	RSUKT	Jumlah pengadaan obat-obatan RS			Pengadaan Obat, Vaksin	RSUKT	Jumlah pengadaan obat-obatan RS		
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki bahan habis pakai sesuai standar	7 UPT	4,748,112,914	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memiliki bahan habis pakai sesuai standar	7 UPT	4,748,112,914
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUKT	Jumlah pengadaan bahan-bahan logistik RS			Pengadaan Bahan Habis Pakai	RSUKT	Jumlah pengadaan bahan-bahan logistik RS		
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan				Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan			
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rs			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSUKT	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rs		
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerima distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP	7 UPT	40,000,000	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerima distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP	7 UPT	40,000,000
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	29,275,098,809	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	9 UPT	29,275,098,809
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	4792	238,135,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	4792	238,135,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan	4806	664,597,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan	4806	664,597,000

			persalinan					persalinan		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4711	17,330,528	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	4711	17,330,528
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah pelayanan balita sesuai standar	6500	120,616,634	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah pelayanan balita sesuai standar	6500	120,616,634
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4275	152,840,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4275	152,840,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26884	56,047,640	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah orang usia produktif (15-59 tahun) yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	26884	56,047,640
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1300	39,045,271	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	1300	39,045,271
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10708	47,046,076	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	10708	47,046,076
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan	3221	72,046,530	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah penderita DM yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan	3221	72,046,530

			kesehatan sesuai standar					kesehatan sesuai standar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	285	30,000,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	285	30,000,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	5835	84,996,652	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	5835	84,996,652
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	6677	93,250,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	6677	93,250,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	6 Kelurahan	1,925,550,429	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan yang mengalami KLB dilakukan PE < 24 jam	6 Kelurahan	1,925,550,429
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Dinas Kesehatan			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi, balita, remaja, dan ibu hamil yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	34000 Orang	126,094,696	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah bayi, balita, remaja, dan ibu hamil yang mendapatkan tambahan makanan dan vitamin	34000 Orang	126,094,696

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar level 1; Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga level 1	6 PKM	48,260,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar level 1; Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan olahraga level 1	6 PKM	48,260,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	111 TFU	267,900,000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Jumlah tempat dan fasilitas umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar	111 TFU	267,900,000
	Dinas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	7 UPT			Dinas Kesehatan	Jumlah fasyankes yang memiliki pengelolaan limbah medis sesuai standar	7 UPT	
	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum/DAM dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	350 DAM			Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum/DAM dilakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan	350 DAM	
	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	140.600 sarana			Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum yang diawasi /diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar	140.600 sarana	
	Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum jaringan perpipaan yang dilakukan pengawasan eksternal /diperiksa kualitas air minumnya	450 sampel			Dinas Kesehatan	Jumlah sarana air minum jaringan perpipaan yang dilakukan pengawasan eksternal /diperiksa kualitas air minumnya	450 sampel	

	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah media promosi yang diadakan sesuai dengan standar	2000 media promosi (leaflet;banner;spanduk)	450,297,545	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah media promosi yang diadakan sesuai dengan standar	2000 media promosi (leaflet;banner;spanduk)	450,297,545
		Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Tangga yang dilakukan Survei PHBS	4200 Rumah Tangga			Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Tangga yang dilakukan Survei PHBS	4200 Rumah Tangga	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan			
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus penyakit potensi KLB Wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam	4 kasus	907,366,728	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus penyakit potensi KLB Wabah dilakukan tindak lanjut dalam waktu 1 x 24 jam	4 kasus	907,366,728
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan gangguan mental emosional (GME) yang mendapat pelayanan jiwa sesuai standar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang dengan gangguan mental emosional (GME) yang mendapat pelayanan jiwa sesuai standar		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan			
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	220 Orang	17,000,000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Dinas Kesehatan	Jumlah calon jemaah haji yang mendapatkan pembinaan istithaah kesehatan haji	220 Orang	17,000,000
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan				Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan			

	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular yang dilaksanakan	9 Jenis	835,578,586	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular yang dilaksanakan	9 Jenis	835,578,586
		Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Pelayanan Kesehatan Tidak Menular yang dilaksanakan	7 jenis			Dinas Kesehatan	Jumlah jenis Pelayanan Kesehatan Tidak Menular yang dilaksanakan	7 jenis	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan oleh Pemerintah	22541 Jiwa	10,724,688,320	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan oleh Pemerintah	22541 Jiwa	10,724,688,320
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasyankes dan Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA.	15 Lokasi	20,000,000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasyankes dan Sekolah yang dilakukan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA.	15 Lokasi	20,000,000
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus penyakit potensi KLB wabah yang dilakukan pengambilan specimen dan dikirimkan ke laboratorium rujukan	1 kegiatan	49,993,922	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah kasus penyakit potensi KLB wabah yang dilakukan pengambilan specimen dan dikirimkan ke laboratorium rujukan	1 kegiatan	49,993,922
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah cakupan tatanan Kota sehat yang sudah dilaksanakan sesuai kriteria Kota Sehat	2 tatanan	100,000,000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah cakupan tatanan Kota sehat yang sudah dilaksanakan sesuai kriteria Kota Sehat	2 tatanan	100,000,000
		Dinas Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang melakukan kegiatan Stop Buang Air Besar	6 Kelurahan			Dinas Kesehatan	Jumlah Kelurahan yang melakukan kegiatan Stop Buang Air	6 Kelurahan	

			Sembarangan (SBS)					Besar Sembarangan (SBS)		
	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Telemedicine	4 PKM	49,800,000	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan Telemedicine	4 PKM	49,800,000
	Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan penelitian kesehatan yang dilakukan			Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan penelitian kesehatan yang dilakukan		
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUKT				Operasional Pelayanan Rumah Sakit	RSUKT			
	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	6 PKM	9,966,842,000	Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Operasional Pelayanan Puskesmas	6 PKM	9,966,842,000
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 UPT	1,115,566,252	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3 UPT	1,115,566,252
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang terakreditasi	6 UPT	358,739,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang terakreditasi	6 UPT	358,739,000
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUKT	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	276 Dokumen	50,000,000	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	RSUKT	Jumlah dokumen standar pelayanan kesehatan	276 Dokumen	50,000,000
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Investigasi Awal Kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditindaklanjuti sesuai standart	1 kegiatan	400,000,000	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan	Jumlah Investigasi Awal Kejadian ikutan pasca imunisasi yang ditindaklanjuti sesuai standart	1 kegiatan	400,000,000
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemiologi	300 Kegiatan	245,470,000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Surveilans Epidemiologi	300 Kegiatan	245,470,000

	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan				Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan			
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	8 UPT, 1 Dinkes	118,500,000	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	8 UPT, 1 Dinkes	118,500,000
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan input data PISPK; Monitoring dan evaluasi capaian Indikator kesehatan	6 PKM; 6 PKM	18,500,000	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan pendataan dan input data PISPK; Monitoring dan evaluasi capaian Indikator kesehatan	6 PKM; 6 PKM	18,500,000
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah platform sistem informasi kesehatan yang dikembangkan			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah platform sistem informasi kesehatan yang dikembangkan		
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Dinas Kesehatan	Jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet		
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUKT	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan yang diadakan	67 Unit	100,000,000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	RSUKT	Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan yang diadakan	67 Unit	100,000,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	83 Persen	160,546,800	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	83 Persen	160,546,800

	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan				Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan			
	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUKT	Jumlah naskah akademis standar pelayanan kesehatan	10 Dokumen	10,000,000	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUKT	Jumlah naskah akademis standar pelayanan kesehatan	10 Dokumen	10,000,000
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD;	1 UPT	125,546,800	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD;	1 UPT	125,546,800
		Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Performance Puskesmas Berprestasi	6 PKM			Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang dilakukan penilaian Performance Puskesmas Berprestasi	6 PKM	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah naskah akademis pengembangan unit RMC; Jumlah dokumen regulasi dan mutu pelayanan yang diimplementasikan			Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah naskah akademis pengembangan unit RMC; Jumlah dokumen regulasi dan mutu pelayanan yang diimplementasikan		
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	RSUKT	Jumlah dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	33 Dokumen	25,000,000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	RSUKT	Jumlah dokumen peningkatan mutu pelayanan kesehatan rujukan	33 Dokumen	25,000,000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	2,836,489,318	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	2,836,489,318

	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	163 Orang	2,572,900,000	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	163 Orang	2,572,900,000
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan				Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan			
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat gaji dan tunjangan	70 Orang	1,372,900,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat gaji dan tunjangan	70 Orang	1,372,900,000
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUKT	Jumlah tenaga kesehatan RS yang mendapat gaji dan tunjangan	53 Orang	1,200,000,000	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	RSUKT	Jumlah tenaga kesehatan RS yang mendapat gaji dan tunjangan	53 Orang	1,200,000,000
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai Standar			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai Standar		
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	263,589,318	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	8 UPT	263,589,318
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	30 Orang	263,589,318	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah SDM Kesehatan yang mendapatkan peningkatan kompetensi	30 Orang	263,589,318

	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100 Persen	232,983,040	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Dinas Kesehatan	Persentase pengawasan obat dan makanan pada masyarakat dan pelaku usaha yang dilakukan	100 Persen	232,983,040
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	17 Ijin	36,050,000	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	17 Ijin	36,050,000
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 Kegiatan	20,000,000	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	6 Kegiatan	20,000,000
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	16,050,000	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	16,050,000

	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	165 IRTP	120,604,200	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	165 IRTP	120,604,200
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah pengelola IRTP yang mendapatkan SPP-IRT; Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan; Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian, alkes dan PKRT	165;215;12 IRTP;Orang;Keg	120,604,200	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah pengelola IRTP yang mendapatkan SPP-IRT; Jumlah masyarakat dan pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tentang obat dan makanan; Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan kefarmasian, alkes dan PKRT	165;215;12 IRTP;Orang;Keg	120,604,200
	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah pemeriksaan post market dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	2 Kegiatan	76,328,840	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah pemeriksaan post market dan pengelolaan data perizinan produk makanan dan minuman IRT	2 Kegiatan	76,328,840

	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2 Kegiatan	76,328,840	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	2 Kegiatan	76,328,840
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100	2,066,226,278	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Dinas Kesehatan	Persentase Kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan	100	2,066,226,278
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1,839,226,335	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	3 Kegiatan	1,839,226,335
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan siaga aktif ; Jumlah Kader Posyandu yang aktif	20 kelurahan; 915 kader	1,839,226,335	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah kelurahan siaga aktif ; Jumlah Kader Posyandu yang aktif	20 kelurahan; 915 kader	1,839,226,335
	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah OPD dan Lintas Sektor yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30 Mitra	196,999,943	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah OPD dan Lintas Sektor yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	30 Mitra	196,999,943
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan Germas	5 Kegiatan	196,999,943	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan Germas	5 Kegiatan	196,999,943
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	4 Kegiatan	30,000,000	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan	4 Kegiatan	30,000,000

Kabupaten/Kota						Daerah Kabupaten/Kota		UKBM		
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah UKBM yang dapat melaksanakan kegawat daruratan	4 Kegiatan	30,000,000		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan	Jumlah UKBM yang dapat melaksanakan kegawat daruratan	4 Kegiatan	30,000,000

E. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2022 belum melaksanakan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang secara langsung menjadi program dan kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan forum perencanaan tahunan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan, untuk menyepakati kegiatan pada tahun anggaran yang berjalan sesuai tingkatannya. Musrenbang bertujuan untuk menampung dan menetapkan kegiatan prioritas, sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara berjenjang mulai dari musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah dan musrenbang Kota. Mekanisme ini ditempuh untuk menyelaraskan program dan kegiatan hasil usulan masyarakat dengan program dan kegiatan pada masing-masing perangkat daerah pengampu usulan tersebut.

Berdasarkan serangkaian kegiatan musrenbang dan forum perangkat daerah tersebut, usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang di ampu oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan untuk Tahun 2022 tertuang dalam tabel 2.4 di bawah ini.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA

Berdasarkan RPJMD Kota Tarakan tahun 2019-2024, Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2021 merupakan tahun kedua pembangunan jangka menengah daerah dan mempunyai peranan penting dalam perwujudan dan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah. Oleh karena itu segala kebijakan yang akan dilaksanakan harus mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan tentang penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, dalam merumuskan dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lain yang berkorelasi dan relevan. Oleh karena itu, dalam menyusun Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2021 ini perlu adanya berbagai pemahaman dan kajian tentang dokumen perencanaan pembangunan, baik nasional, Provinsi Kalimantan Utara maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2021.

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

1. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021

Pembangunan suatu negara identik dengan persoalan pemerataan capaian pembangunan secara optimal dan berkualitas. Permasalahan inilah yang menjadi salah satu dasar bagi setiap pengambil kebijakan di pemerintah pusat dalam merumuskan berbagai kebijakan dan penyempurnaan kebijakan agar dalam pembangunan selalu mengalami peningkatan capaian kinerja.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, yang disusun secara *holistik-tematik*, integratif dan spasial. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

dengan Tema RKP Tahun 2021 adalah “**Meningkatkan Industri Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM dan Infrastruktur untuk pertumbuhan Berkualitas**”, maka sasaran dan target yang harus dicapai pada akhir Tahun 2021, antara lain:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 72,5
- Tingkat Kemiskinan; 8,5 - 9 persen
- Pertumbuhan Ekonomi: 5,3 - 5,7persen
- Tingkat Inflasi: 3 (\pm 1)
- Gini Rasio: 0,375 - 0,380
- Tingkat Pengangguran Terbuka: 4,8 - 5,1
- Sasaran pemerataan pembangunan antar wilayah: kontribusi wilayah erhadap pembangunan nasional; Sumatera 4,62 persen, Jawa-Bali 5,74 persen, **Kalimantan 4,08 persen**, Sulawesi 6,68 persen, Nusa Tenggara 3,12 persen, Maluku 6,88 persenPapua 7,18 persen.

Tema pembangunan tersebut menurunkan 7 Prioritas Nasional Tahun 2021 antara lain:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan energi baru dan terbarukan
2. Peningkatan kualitas / ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Peningkatan ketersediaan akses dan kualitas konsumsi pangan
4. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan
5. Penuatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan Koperasi
6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor rill dan industrialisasi
7. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat kandungan dalam negeri
8. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan wilayah Sumatra
- 2) Pengembangan wilayah Jawa Bali
- 3) Pembangunan wilayah Nusa Tenggara
- 4) Pembangunan Wilayah Kalimantan
- 5) Pembangunan Wilayah Sulawesi
- 6) Pembangunan Wilayah Maluku
- 7) Pengembangan Wilayah Papua

3. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Sosial dan penguatan tata kelola Kependudukan
- 2) Penguatan pelaksanaan perlindungan Sosial
- 3) Peningkatan Akses dan mutu pelayanan kesehatan
- 4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas
- 5) Peningkatan Kualitas anak, perempuan dan pemuda
- 6) Pengentasan Kemiskinan
- 7) Peningkatan produktivitas dan daya saing

4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan arah kebijakan yaitu:

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila
- 2) Peningkatan Pemajuan dan pelestarian kebudayaan
- 3) Memperkuat moderasi beragama
- 4) Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas

5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar
- 2) Infrastruktur Ekonomi
- 3) Infrastruktur Perkotaan

- 4) Energi dan Ketenagalistrikan
- 5) Transformasi Digital

6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- 2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim
- 3) Pembangunan rendah karbon

7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik

Untuk mendukung prioritas nasional tersebut maka Program Prioritas yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Konsolidasi Demokrasi
- 2) Optimalisasi kebijakan luar negeri
- 3) Penegakan Hukum Nasional
- 4) Reformasi birokrasi dan Tata Kelola
- 5) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional
- 6) Reformasi dan Tata Kelola

B. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN PROVINSI KALTARA

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 ialah **“Mewujudkan Masyarakat Kalimantan Utara Yang Mandiri, Aman dan Damai”**. Berdasarkan tema tersebut terdapat 5 prioritas daerah yang dilaksanakan dalam RKPD Prov. Kaltara Tahun 2021 yaitu:

- 1) Pembangunan Manusia
- 2) Pembangunan Ekonomi
- 3) Pembangunan Kewilayahan
- 4) Pembangunan Infrastruktur
- 5) Pembangunan Keamanan, ketertiban, dan Tata kelola Pemerintahan

Prioritas daerah Provinsi Kaltara tahun 2021 diturunkan kedalam beberapa arah kebijakan yang juga mempedomani prioritas nasional. Adapun beberapa arah kebijakan provinsi yang berkontribusi langsung terhadap Prioritas Nasional (PN) tahun 2021 antara lain:

- 1) PN 1: Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:

- a. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
 - b. Pengembangan Usaha Kecil, Koperasi dan IKM
 - c. Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah
 - d. Peningkatan Daya Tarik Berinvestasi
- 2) PN 2: Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Yang Terintegrasi dengan Tata Ruang
 - b. Percepatan Pembangunan Desa Secara Terpadu
- 3) PN 3: SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
 - b. Peningkatan Kesempatan Kerja dan Kualitas Kerja
 - c. Percepatan Penanggulangan Kemsikinan dan Kemandirian PMKS
- 4) PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Yang Terpadu
- 5) PN 5: Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Pelayanan Pendidikan
 - b. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
- 6) PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- 7) PN 7: Stabilitas Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik, yang didukung arah kebijakan Provinsi Kaltara tahun 2021 antara lain:
- a. Peningkatan Sistem Pelayanan Prima.
 - b. Fasilitas Perwujudan Wilayah Perbatasan Yang Tertib dan Tentram
 - c. Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Gangguan Keamanan dan Kebencanaan terpadu

C. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN

Arah kebijakan pembangunan manusia di bidang kesehatan terfokus pada upaya

peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; yang artinya arah dan strategi RPJMN bidang kesehatan 2020 - 2024 adalah meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (Primary Health Care) dan peningkatan upaya promotif dan preventif didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Untuk menjamin mutu pelayanan bidang kesehatan, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Terdapat beberapa penekanan kepada pemerintah daerah dalam peraturan menteri kesehatan ini.

Penekanan itu diantaranya adalah kewajiban bagi setiap pemerintah daerah untuk memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM Bidang Kesehatan. Kewajiban bagi pemerintah kota Tarakan ini wajib tertuang menjadi capaian kinerja pemerintah kota dengan target 100 % dari masing-masing indikator. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan lampiran permenkes ini yang menyebutkan bahwa SPM bidang kesehatan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada warga negara. Sehingga pemerintah kota Tarakan harus memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM. Termasuk dalam hal pemenuhan sumber daya manusia kesehatan di level Puskesmas. Pada tabel di bawah ini rincian indikator dan target SPM Kesehatan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tarakan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.

Capaian Indikator SPM Kesehatan Tingkat Kota Tarakan Tahun 2020

No.	Indikator	Definisi Operasional Capaian Kinerja	Target	Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu tertentu.	100%	127,38%
2	Pelayanan Kesehatan	Capaian kinerja pemerintah daerah	100%	133,83%

	Ibu Bersalin	kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu tertentu.		
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dinilai dari cakupan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	137,75%
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%	20,01%
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan pada anak usia pendidikan dasar dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan anak setingkat pendidikan dasar sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun ajaran.	100%	93,63%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan usia produktif	100%	16,08%

		dinilai dari persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu tertentu		
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar pada warga negara usia 60 tahun atau lebih dinilai dari cakupan warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	4,81%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun	100%	10,05%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita DM usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%	31,54%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan	100%	63,12%

	Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ODGJ Berat, dinilai dari jumlah ODGJ Berat yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.		
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.	100%	56,85%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh (<i>Human Immunodeficiency Virus = HIV</i>)	Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan HIV sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu tertentu.	100%	100%

a. Tema Pembangunan Kota Tarakan dalam RKPD 2022.

Yang menjadi tema pembangunan Kota Tarakan pada tahun 2019 adalah:

“PENGEMBANGAN EKONOMI WILAYAH DAN SUMBERDAYA LOKAL YANG BERKUALITAS”

b. Visi, Misi, dan Program Unggulan Pemerintah Kota Tarakan 2019-2024.

Pada tahun 2019 kota Tarakan memasuki periode pemerintahan yang baru, sehingga visi dan misi bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan, menjadikan visi dan misi kota Tarakan menjadi visi dan misi seluruh perangkat daerah.

Visi kota Tarakan tahun 2019-2024 adalah: “Mewujudkan Tarakan Sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City”.

Adapun Misi Kota Tarakan Tahun 2019-2024 yaitu:

- (1). Misi 1: Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing;
- (2). Misi 2: Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro-Rakyat;
- (3). Misi 3: Meningkatkan dan Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Publik yang Cepat, Mudah, Murah, Adil, dan Transparan;
- (4). Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata dan Pertanian Dalam Arti Luas;
- (5). Meningkatkan Pemanfaatan Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Melalui Peningkatan Nilai Tambah yang Berwawasan Lingkungan dengan Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna, Kreatif dan Inovatif Berbasiskan Ilmu Pengetahuan; dan
- (6). Meningkatkan Pembangunan Akhlak dan Moral Sesuai Kearifan Lokal Serta Mewujudkan Kepastian Hukum dan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.

1. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kota Tarakan

Terkait tugas dan fungsi selaku perangkat daerah, Dinas Kesehatan menjalankan misi kota Tarakan yaitu sebagai berikut:

- a) Misi 1 yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Dengan tujuan: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan sasarannya yaitu: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Indikator dari sasaran ini yaitu: Angka Harapan Hidup;
- b) Misi 2 yaitu Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Amanah, Profesional, Efektif dan Efisien yang Berbasis pada Sistem Penganggaran yang Pro-Rakyat. Dengan tujuan: Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan. Sedangkan sasarannya yaitu: Terwujudnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel. Indikator dari sasaran ini yaitu: Nilai SAKIP/Predikat; dan
- c) Misi 4 yaitu Mengembangkan Ekonomi Daerah yang Berorientasi Kepada Kepentingan Rakyat (Ekonomi Pro Rakyat) Melalui Sektor Perdagangan, Jasa, Industri, Pariwisata dan Pertanian Dalam Arti Luas. Dengan tujuan yaitu:

Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Daerah. Sasaran dari tujuan ini adalah Menurunkan Angka Kemiskinan. dengan indikator: Angka Kemiskinan.

Berangkat dari visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan di atas, kemudian ditetapkan Tujuan Perangkat Daerah, Indikator Tujuan, Sasaran Strategis, serta Indikator Sasaran sebagai berikut:

Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan pada dokumen Rencana Kerja (Renja) beserta target indikator sasaran pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Tahun 2021
Dinas Kesehatan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan	Persentase Capaian SPM Bidang Kesehatan	58,33%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Pemenuhan Sumber Daya Sesuai Kebutuhan		50%	60%	65%	70%	75%
			Persentase Capaian Program Upaya Kesehatan Masyarakat		50%	60%	65%	70%	75%
			IKM Kesehatan		70	71	72	73	75

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	Target				
					2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	UHC	Tercapainya UHC	Persentase Capaian UHC	96,29	95%	96%	97%	98%	95%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai/Predikat AKIP	Meningkatnya Tata Kelola Pada Dinas Kesehatan	Nilai AKIP >70/B	67,47/B	68/B	68/B	69/B	69/B	70/B
			Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Ditindaklanjuti		90%	90%	90%	90%	90%

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KESEHATAN KOTA TARAKAN
TAHUN 2022

A. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019 – 2024. Renja ini disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan tahun 2022. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 di susun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana kerja ini memuat tujuan dan sasaran, Program dan Kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta tujuan dan Sasaran Janga Menengah Daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Rencana Kerja merupakan acuan dari setiap perangkat daerah dalam mengoperasikan program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam melaksanakan tujuan dan sasaran merencanakan 5 (Lima) Program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
4. Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Dari program tersebut di atas diimplikasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan , Peganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Kepegawaaian Perangkat Daerah
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- h. Peningkatan Pelayanananan BLUD

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi
- d. Penertiban Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
- b. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota.

4. Program Sediaan Farmasi , Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman

- a. Pemberian Izin Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan optikal, Usaha Mikro obat Tradisional (UMOT)
- b. Penertiban Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi , untuk produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh industri Rumah Tangga.
- c. Pemeriksaan dan Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan produk Makanan dan Minuman industri Rumah Tangga.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

- a. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dari uraian tersebut di atas secara rinci Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Dinas Kesehatan dalam lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET KINERJA	NILAI PAGU	SUMBER DANA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang tersedia	Dinas Kesehatan Dan UPTD (RSUKT)	2 Dokumen	10.000.000,-	APBD Kota
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	6 Layanan	56.359.929.603	APBD Kota
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Kepegawaian	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	8 layanan	1.217.363.600	APBD Kota
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum yang terlaksana	Dinas Kesehatan Dan UPTD (RSUKT)	8 layanan	262.000.000	APBD Kota
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah aset/BMD yang diadakan	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	26 Unit	450.000.000	APBD Kota

6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah layanan jasa penunjang yang tersedia	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	7 layanan	1.600.084.700	APBD Kota
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset/BMD yang dipelihara	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	317 Unit	1.306.737.560	APBD Kota
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas;	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Gunung Lingkas (75%); Karang rejo (80%), Juata (75%) , Sebengkok (75%) , mamburungan (75%) dan Persentase capaian SPM RS (70%)	41. 575.163.449	APBD Kota
				Jumlah RP.	102.781.278.912	
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					

1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memiliki fasilitas kesehatan sesuai standard dan Jumlah RS Rujukan kab/kota yang memenuhi sarpras dan alkes sesuai standar	Dinas Kesehatan dan UPTD (RSUKT)	8 UPT dan 4 RS	93.983.207.901	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang melaksanakan pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan	9 UPT	29.275.098.809	Dak Non Fisik
3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Jumlah OPD dan UPT yang menerapkan sistem informasi	Dinas Kesehatan (RSUKT)	8 UPT, 1 Dinkes	118.500.000	APBD Kota
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang menerapkan BLUD	Dinas Kesehatan dan UPT (RSUKT)	83 Persen	160.546.500	APBD Kota
				Jumlah Rp.	123.537.353.510	
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					
1	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah	Jumlah SDM kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Dinas Kesehatan dan UPT (RSUKT)	163 Orang	2.572.900.000	APBD Kota

	Kabupaten/Kota					
2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UPT yang memenuhi persyaratan sumber daya manusia kesehatan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan	Dinas Kesehatan dan UPT	8 UPT	263.589.316	APBD Kota
				Jumlah RP.	2.836.489.318	
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah rekomendasi izin yang diterbitkan	Dinas Kesehatan	17 ijin	36.050.000	DAK
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan	Dinas Kesehatan	165 IRTP	120.604.200	DAK
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada	Dinas Kesehatan	2 Kegiatan	76.328.840	DAK

	dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				
				Jumlah Rp.	232.983.040	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Dinas Kesehatan	3 Kegiatan	1.839.226.335	APBD Kota
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD dan Lintas Sektor yang melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Dinas Kesehatan	30 Mitra	196.999.943	APBD Kota
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan dan pelaksanaan UKBM	Dinas Kesehatan	4 Kegiatan	30.000.000	APBD Kota
				Jumlah Rp.	2.066.226.278	
	5 Program 20 kegiatan			Jumlah. Rp.	231.454.331.058	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kota Tarakan Tahun 2019-2024, yang merupakan rangkaian rencana tindakan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Tarakan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Dinas Kesehatan, penyusunan Renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Dinas Kesehatan maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja Dinas Kesehatan Kota Tarakan tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi Kepala Daerah Periode 2019-2024 yaitu " **Terwujudnya Tarakan sebagai Kota Maju dan Sejahtera Melalui Smart City** ".

Tarakan, Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Kesehatan



dr. Devi Ika Indriarti., M.Kes
NIP. 197005172002122006